

ISSN : 1411-1713



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Kampus Gunung Kelua Samarinda Telp./Fax.(0541) 743914
Email :journal.fe.unmul@gmail.com http://journal.feunmul.in

Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi
Forum Ekonomi

Vol. XVI No. 1 Januari 2013

Doddy Adhimursandi

Pengaruh Pelayanan Bagi Hasil dan Keyakinan terhadap Keputusan Menabung Nasabah pada BRI Syariah Cabang Samarinda

Zainal Ilmi

Peranan Sikap Mental Kepemimpinan Strategis terhadap Kinerja Organisasi

Yonathan Pongtuluran

Analisis Manfaat dan Biaya Usaha Penggemukan Sapi Potong di Provinsi Kalimantan Timur
Studi Kasus : Pola Usaha Perorangan dan Sistem Berkelompok

Juliansyah Roy

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Timur

Rizky Yударuddin

Pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Kurs terhadap Harga Saham Perbankan di Indonesia

P. S. Siburian dan Irwan Gani

Tinjauan tentang Ekonomi Kerakyatan dalam Program Gerbang Raja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2016

Syharuddin Y.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dirga Lestari

Pengaruh Motivasi, Kompetensi dan Pengembangan Karier terhadap Kinerja Dosen Universitas Mulawarman Samarinda

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN TIMUR

Juliansyah Roy

Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman

ABSTRACT

This research aimed to find out the influence decentralization fiscal on economic growth in East Kalimantan.

This research was executed in Province of East Kalimantan. Method applied in this research is structural equation model by using panel data then data in analysis with computer program SPSS ver. 15 and Amos ver. 16.0.

Result of research indicates that: (1) Decentralization fiscal influential positive and significant on economic growth in East Kalimantan; (2) Region tax of influential positive and dominant on economic growth in East Kalimantan.

Keywords: Fiscal Decentralization; Economic Growth.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi yang dimulai beberapa tahun lalu di Indonesia telah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan. Aspek pemerintahan yang dimaksud di sini adalah aspek hubungan pemerintahan pusat dengan daerah. Pada aspek ini isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karenanya sejak tanggal 1 Januari 2001 Bangsa dan Negara Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana otonomi daerah dilaksanakan di seluruh Dati II (kota dan kabupaten). Hampir seluruh kewenangan pemerintah pusat diserahkan pada daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Menurut United Nation Development Program (UNDP) bentuk-bentuk desentralisasi dalam era otonomi daerah adalah sebagai berikut; desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik, dan desentralisasi pelayanan.

Sampai saat ini, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang desentralisasi fiskal tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif, dan geografis. Selain itu hasil studi desentralisasi fiskal sering kali tidak menghasilkan kesimpulan yang sama di antara para peneliti dan peminat desentralisasi. Ada silang pendapat dengan masing-masing pihak memiliki argumentasi logis serta telah membuktikannya secara empiris. Dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, hasil studi dari beberapa ahli seperti Davoodi dan Zou (1998) serta Woller dan Phillips (1998) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Lebih jauh, Zhang dan Zou (1998) serta Xie,

et. al. (1999) mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kurang menguntungkan bagi pembangunan. Sebaliknya, hasil studi Iimi (2005) dan Malik dkk. (2006) menunjukkan hasil berbeda, yakni bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pada awal desentralisasi fiskal, transfer ke daerah berupa Dana Perimbangan (DAPER) hanya sebesar Rp.81,1 triliun, dan meningkat sebesar 16,8 persen di tahun 2002 menjadi Rp.94,7 triliun. Tahun 2006 Dana Perimbangan mencapai Rp.222,2 triliun atau meningkat sebesar 55,2 persen dari tahun sebelumnya. Sampai tahun 2008, besarnya dana perimbangan telah mencapai Rp.278,7 triliun.

Selain transfer ke daerah yang mengalami pelonjakan drastis, desentralisasi dan otonomi daerah ini juga diwarnai oleh maraknya pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota. Jika pada tahun 1998 jumlah provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 27 propinsi, maka pada tahun 2006 bertambah menjadi 33 propinsi atau meningkat 22,2 persen. Begitu juga daerah kabupaten yang hanya semula hanya berjumlah 274 pada tahun 1999, di tahun 2006 mencapai 348 kabupaten atau meningkat 27 persen. Sedangkan daerah kota yang semula berjumlah 70 menjadi 86 daerah di tahun 2006. Pada tahun 2008 jumlah kabupaten telah mencapai 387 dan kota 96 daerah, sehingga total daerah kabupaten/kota pada tahun 2008 sebanyak 483 daerah.

Mengikuti fenomena yang terjadi secara nasional, pemekaran wilayah di provinsi Kalimantan Timur juga terjadi secara signifikan. Sejak tahun 1999 banyak terjadi perubahan wilayah administratif sebagai akibat adanya pembentukan daerah baru, antara lain berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 terbentuknya Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Malinau, Nunukan, Kota Tarakan dan Kota Bontang serta berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten termuda yaitu kabupaten Tana Tidung yang terbentuk berdasarkan UU No. 34 tahun 2007. Sehingga saat ini Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas 10 kabupaten dan 4 kota, dari sebelumnya yang hanya terdiri atas 4 kabupaten dan 2 kota.

Meski terjadi euforia terhadap kebijakan desentralisasi, implementasi desentralisasi fiskal di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini cenderung belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Jika dilihat dari indikator PDRB per kapita, Provinsi Kalimantan Timur seharusnya bisa lebih maju dibanding provinsi lain, mengingat tingginya PDRB per kapita bahkan lebih tinggi dari PDRB per kapita nasional seperti terlihat pada Tabel 1:

Tabel 1. PDRB Per Kapita Kalimantan Timur dan Indonesia Tahun 2006-2009

Tahun	PRDB Per Kapita (Harga Berlaku)		PRDB Per Kapita (Harga Konstan)	
	Kaltim	Indonesia	Kaltim	Indonesia
2006	27,824,197	15,028,519	16,187,002	8,313,201
2007	32,401,767	17,509,565	17,435,017	8,205,504
2008	43,165,925	21,666,748	18,084,330	9,112,051
2009	47,816,116	24,201,805	18,808,021	9,409,086

Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2010 dan Kaltim Dalam Angka 2010

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, “apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur”?

1.3. Hipotesis

Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan maka hipotesis dalam penelitian ini adalah desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur

II. KAJIAN TEORITIS

Teori desentralisasi fiskal tradisional biasa juga disebut teori generasi pertama dari desentralisasi fiskal (*first-generation theory of fiscal federalism*). Menurut Oates, Wallace G. (2008) teori ekonomi tradisional mengenai desentralisasi fiskal didasarkan pada potensi keuntungan kesejahteraan yang akan diperoleh dari alokasi sumber daya yang lebih efisien pada sektor publik, khususnya pada kasus barang publik lokal (*local public goods*).

Kelompok barang publik tersebut terdiri dari pelayanan publik dimana yang mengkonsumsinya dibatasi secara geografi hanya untuk penduduk daerah tersebut. Dalam sistem sentralisasi fiskal, tingkal desentralisasi pemerintah berada dalam posisi untuk menentukan tingkat output yang akan dihasilkan terhadap barang-barang yang sesuai dengan biaya dan preferensi masyarakat lokal. Perbedaan dalam output lokal atas pelayanan publik akan memberikan keuntungan terhadap kesejahteraan ekonomi relatif terhadap output yang dihasilkan dalam sistem sentralistik yang lebih cenderung menghasilkan output pada tingkat yang sama untuk semua daerah.

2.1. Model Desentralisasi Tiebout

Tiebout (1956), dalam papernya yang sangat terkenal, menunjukkan bahwa suatu model pembiayaan lokal dimana setiap keluarga bebas berpindah untuk memilih daerah yang sesuai dengan preferensi mereka atas pelayanan publik yang disediakan oleh daerah. Pada model tersebut Tiebout membuat suatu analog sektor publik lokal dengan pasar swasta yang mampu menghasilkan dengan pengalokasian sumber daya yang efisien. Karena individu dalam model tersebut tidak dihadapkan pada kendala tempat kerja dalam memilih tempat tinggal mereka, maka model Tiebout dapat dilihat sebagai model “pembiayaan metropolitan” (*metropolitan finance*). pada umumnya melihat model tersebut menyediakan gambaran yang berguna bagi perilaku fiskal dalam menentukan metropolitan dimana individu dapat bekerja di tengah-tengah kota, tetapi memilih untuk tinggal di luar kota.

Beberapa ahli melihat model Tiebout ini sebagai pusat dari teori desentralisasi fiskal. Keuntungan dari desentralisasi fiskal yang dijelaskan dalam teorema desentralisasi (*Decentralization Theorem*) sebelumnya, tidak tergantung pada mobilitas penduduk, dimana dikatakan walaupun tidak terdapat mobilitas penduduk antar daerah, namun keuntungan kesejahteraan dari desentralisasi fiskal masih tetap ada, akibat adanya variasi permintaan dan fungsi biaya untuk pelayanan publik lokal

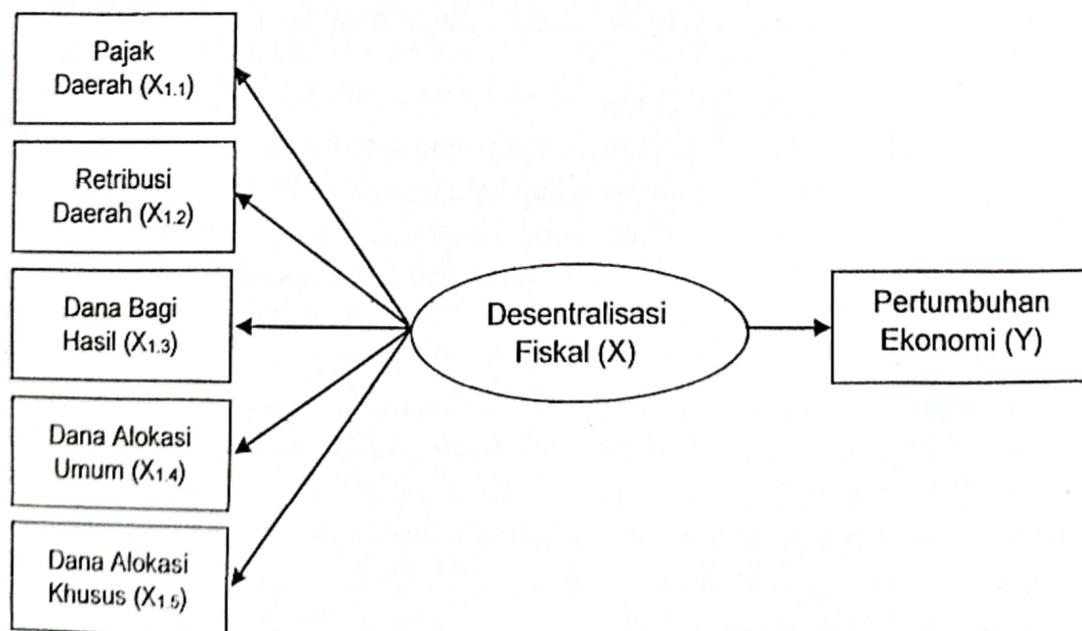
antar daerah. Taksonomi Tiebout tersebut dapat meningkatkan keuntungan kesejahteraan dengan memperbolehkan penduduk dengan preferensi yang sama untuk berkumpul bersama, namun demikian walaupun tanpa menghasilkan output berdasarkan pada kondisi lokal. Singkatnya, model Tiebout bukan merupakan sinonim dari teori desentralisasi fiskal (Oates, 2008).

2.2. Teorema Desentralisasi Oates

Oates (1972) telah memformulasikan idenya dalam suatu teorema yang disebut Teorema Desentralisasi (*The Decentralization Theorema*). Poin yang mendasari adalah jika tidak terdapat keuntungan biaya (skala hasil) yang berhubungan dengan kondisi sentralisasi, maka pola desentralisasi terhadap barang publik yang menggambarkan adanya perbedaan selera di antara daerah-daerah yang ada akan meningkatkan kesejahteraan dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari sentralisasi yang menggambarkan tingkat output yang seragam untuk semua daerah. Secara khusus, teorema tersebut bersandar pada dua asumsi yang kuat. Pertama, diasumsikan bahwa output dari barang-barang publik yang dihasilkan dapat memaksimalkan kesejahteraan penduduk dari masing-masing daerah. Kedua, kondisi sentralisasi diasumsikan menghasilkan barang publik pada tingkat yang sama untuk semua daerah. Hal ini tentu saja tidak harus benar. Tidak terdapat alasan yang prinsipil, mengapa pemerintah pusat tidak dapat menghasilkan barang publik lokal pada tingkat yang berbeda antar daerah sebagai respons terhadap adanya variasi dan biaya di antara daerah-daerah tersebut.

Secara konsep bentuk hubungan fungsional pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada gambar kerangka konsep di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Konsep Hubungan Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi



III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model persamaan struktural (SEM) dalam menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, secara matematis dapat dilihat pada persamaan spesifikasi model pengukuran untuk menentukan variabel dan rangkaian matriks yang menunjukkan korelasi antar variabel adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= \alpha_1 X + Z \\
 (X_{1,1}) &= \lambda_1 TB (X_1) + e_1 \\
 (X_{1,2}) &= \lambda_2 PP (X_2) + e_2 \\
 (X_{1,3}) &= \lambda_3 TB (X_3) + e_3 \\
 (X_{1,4}) &= \lambda_4 PP (X_4) + e_4 \\
 (X_{1,5}) &= \lambda_5 PP (X_5) + e_5
 \end{aligned}$$

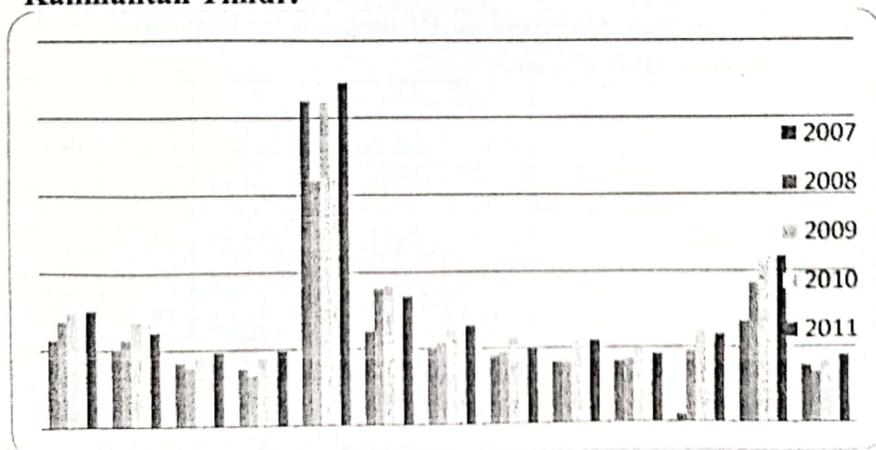
dimana

- Y = Pertumbuhan ekonomi
- (X_{1,1}) = Pajak Daerah
- (X_{1,2}) = Retribusi Daerah
- (X_{1,3}) = Dana alokasi umum
- (X_{1,4}) = Dana alokasi khusus
- (X_{1,5}) = Dana bagi hasil

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah pusat menyalurkan dana ke daerah dalam bentuk dana hibah yang penggunaannya telah ditentukan. Dana yang paling besar adalah subsidi daerah otonom (SDO). Pengeluaran pembangunan di danai melalui sistem Inpres (Instruksi Presiden), yang merupakan dana Instruksi presiden untuk mendanai berbagai tujuan pembangunan secara spesifik, mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan gedung sekolah dan pasar. Setelah pelaksanaan sistem desentralisasi pada 2001, pemerintah pusat mengalihkan dana untuk mengurangi kesenjangan fiskal baik secara vertikal maupun horizontal seperti yang ditentukan dalam undang-undang desentralisasi.

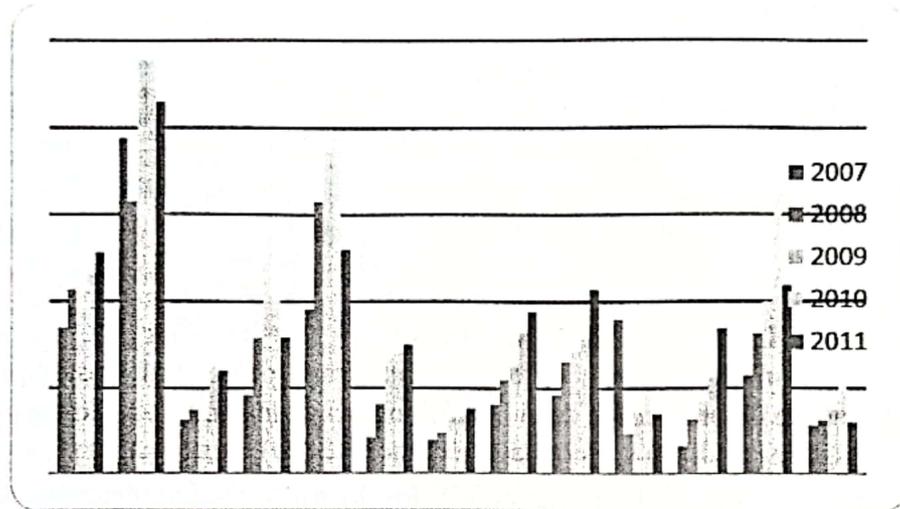
Gambar 2. Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.



Berdasarkan grafik di atas, selama kurun waktu lima tahun terakhir terutama dalam kaitan pelaksanaan desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan terlihat bahwa pendapatan daerah terbesar terletak pada Kabupaten Kutai Kartanegara dan kemudian disusul oleh Kabupaten Berau dan Kutai Timur sedangkan Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan kabupaten dengan pendapatan daerah terendah. pendapatan daerah masing-masing kabupaten dan kota secara keseluruhan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain (lihat Gambar 3), kemampuan daerah dalam hal menggali potensi penerimaan terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah terlihat bahwa Kota Balikpapan menjadi Kota dengan pendapatan asli daerah terbesar kemudian disusul oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda.

Gambar 3. Grafik Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.



Akan tetapi apabila dilihat dari komponen pembentuk pendapatan asli daerah, maka terlihat bahwa komponen terbesar yang membentuk pendapatan asli daerah adalah komponen penerimaan yang bersumber dari penerimaan lain-lain PAD yang sah. hanya Kota Samarinda dan Balikpapan yang mampu menggali potensi penerimaan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Persentase Komponen Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kalimantan Timur.

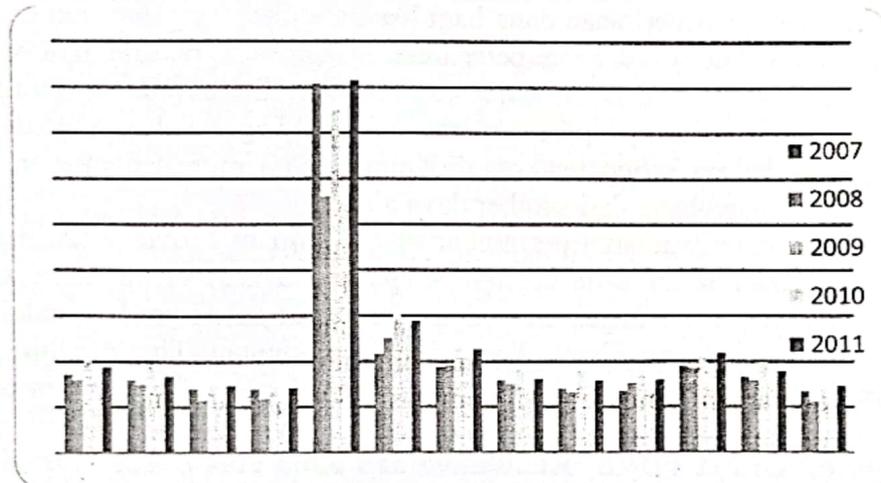
NO	KABUPATEN/KOTA	2007			2011		
		Pajak	Retribusi	Lain-lain	Pajak	Retribusi	Lain-lain
1	SAMARINDA	36,45	32,52	28,14	46,13	39,98	8,90
2	BALIKPAPAN	23,50	11,85	14,41	41,08	13,51	6,65
3	BONTANG	45,08	6,67	41,45	25,01	4,73	55,50
4	TARAKAN	19,69	12,03	55,36	17,03	9,48	6,73
5	KUTAI KARTANEGARA	8,22	13,70	72,30	7,51	6,82	75,74
6	KUTAI TIMUR	5,96	13,09	72,16	6,34	10,16	46,11
7	KUTAI BARAT	9,64	19,40	57,18	20,45	16,19	50,62
8	BULUNGAN	5,07	10,78	69,23	3,08	26,98	51,47

NO	KABUPATEN/KOTA	2007			2011		
		Pajak	Retribusi	Lain-lain	Pajak	Retribusi	Lain-lain
9	PASER	2,47	18,50	73,94	3,33	13,16	77,62
10	NUNUKAN	1,35	3,08	25,51	5,38	23,63	59,12
11	MALINAU	2,77	6,14	91,10	0,95	10,00	75,65
12	BERAU	8,87	9,80	74,76	4,32	11,00	65,76
13	PENAJAM PASER UTARA	2,62	14,27	75,03	2,58	9,31	68,87

Sumber: Data diolah.

Di sisi lain, ketergantungan pemerintah daerah khususnya kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi, hal ini terlihat dari komposisi dana perimbangan yang sangat besar dikucurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Kalimantan Timur dimana Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Kabupaten penerima dana perimbangan terbesar dan disusul oleh kabupaten Kutai Timur.

Gambar 4. Grafik Dana Perimbangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.



Akan tetapi, komponen terbesar yang membentuk pendapatan daerah kabupaten/kota di Kalimantan Timur lebih besar didominasi penerimaan yang bersumber dari dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam.

Gambar 5. Grafik Prosentase Komponen Pendapatan Daerah dari Dana Bagi Hasil SDA di Kalimantan Timur

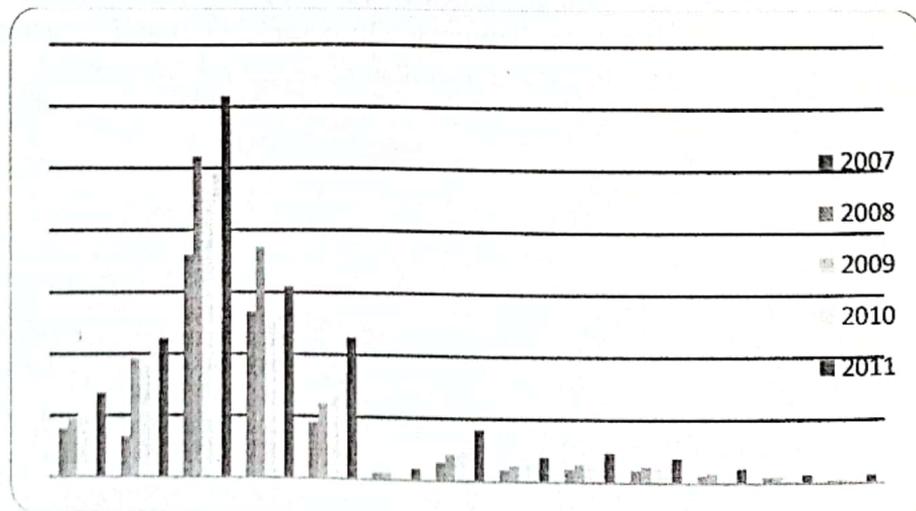


Hal ini sejalan dengan kondisi di Kalimantan Timur sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam terutama yang bersumber dari pertambangan, baik dari pertambangan minyak dan gas maupun dari pertambangan non-migas seperti pertambangan batu bara.

Berdasarkan grafik di atas, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten dengan penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam terbesar dibanding kabupaten/kota lainnya dengan persentase penerimaan rata-ratanya sebesar 70%, sedangkan secara umum rata-rata kabupaten/kota di Kalimantan Timur menerima 50% pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil sumber daya alam. ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Timur sangat menggantungkan perekonomian daerahnya dari sumber daya alam.

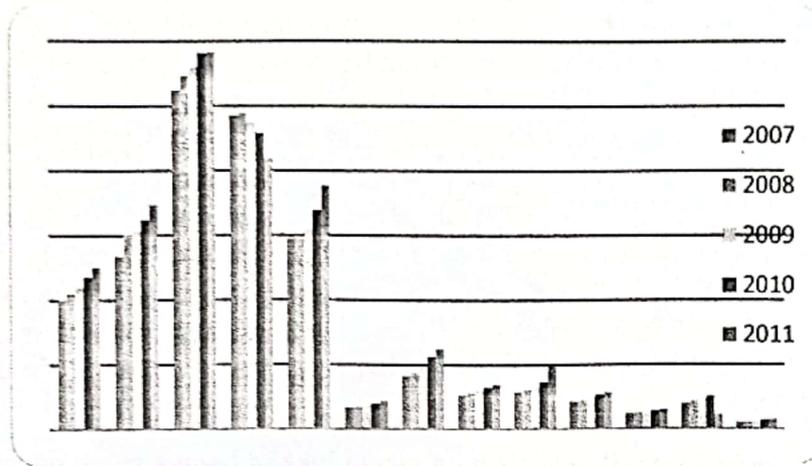
Sedangkan gambaran pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan salah satu daerah penghasil devisa negara yang cukup besar khususnya dari pertambangan dan migas yang merupakan produk andalan terutama dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur sehingga struktur ekonomi Kalimantan Timur lebih di dominasi sektor pertambangan dan migas.

Gambar 6. Grafik PDRB Kabupaten dan Kota atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Kalimantan Timur.



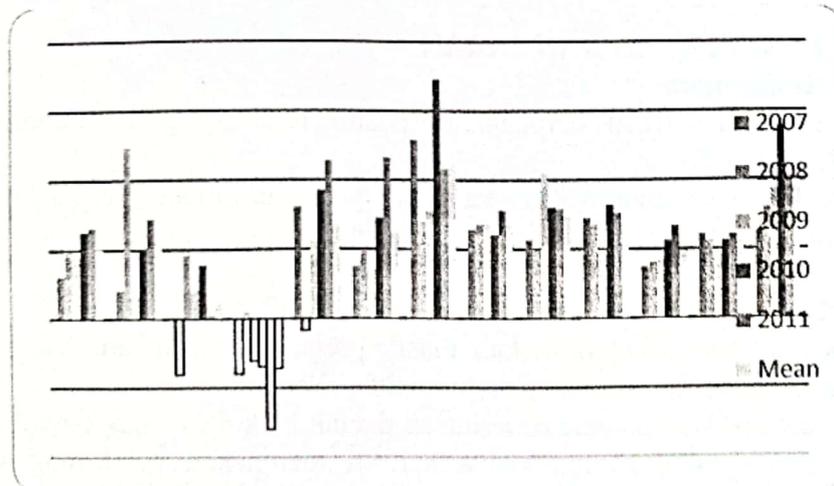
Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa daerah dengan total PDRB atas dasar harga berlaku terbesar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian disusul oleh Bontang, Balikpapan, Kutai Timur dan Samarinda. Hal sama juga terlihat apa bila kita menggunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, terlihat juga bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara kemudian disusul oleh Bontang, Kutai Timur, Balikpapan dan Samarinda. Akan tetapi berdasarkan harga konstan tahun 2000, PDRB Kabupaten Kutai Timur lebih besar dibanding Balikpapan dan Samarinda.

Gambar 7. Grafik PDRB Kabupaten dan Kota atas Dasar Konstan Tahun 2000 di Provinsi Kalimantan Timur.



Hal sebaliknya terlihat apabila kita melihat kinerja pertumbuhan PDRB masing-masing kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, apabila secara nominal menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara

Gambar 8. Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten dan Kota atas Dasar Konstan Tahun 2000 di Provinsi Kalimantan Timur.

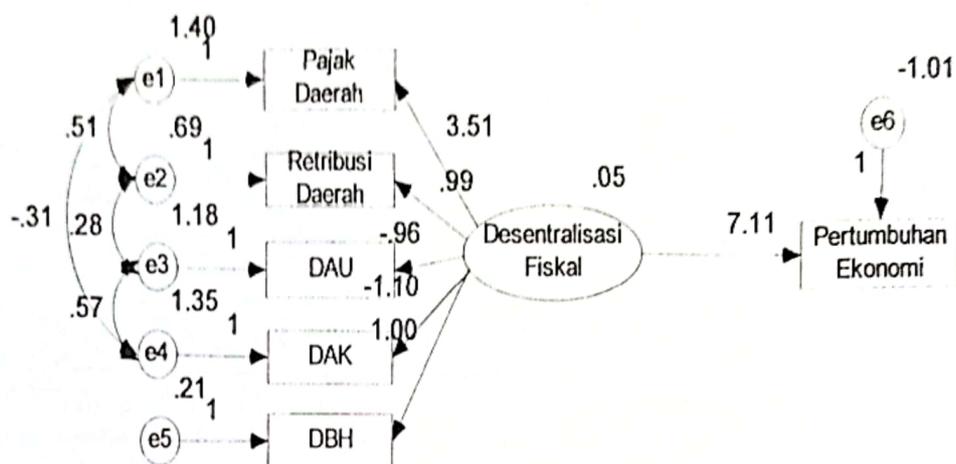


Kemudian disusul oleh Bontang, Kutai Timur, Balikpapan dan Samarinda. akan tetapi, dilihat dari kinerja perekonomian dalam hal ini pertumbuhan PDRB kabupaten dan kota maka terlihat bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara hanya tumbuh

rata-rata per tahun sebesar 1,37 persen, kemudian Kota Bontang tumbuh dengan rata-rata per tahun -3,58 persen, kemudian Balikpapan tumbuh dengan rata-rata per tahun 5,70 sedangkan Samarinda hanya 5,06 persen per tahun. (lihat gambar 8).

Hasil analisis menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 7,11 dengan nilai *critical ratio* sebesar 2,632 dan probability sebesar 0,008. (lihat Gambar 9).

Gambar 9. Hasil Analisis SEM pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur



Di sisi lain, hasil analisis juga menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan variabel yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, hal ini ditunjukkan dengan nilai *loading factor* sebesar 3,51 dibandingkan dengan empat variabel lain yang menjadi ukuran desentralisasi fiskal.

Dengan demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kalimantan Timur memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
2. Pajak daerah merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.

5.2. Saran

1. Desentralisasi fiskal dirasakan masih perlu dipertahankan, hal ini didasarkan dampak positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Memaksimalkan potensi penerimaan daerah baik dari pajak daerah maupun dari retribusi daerah, karena kedua hal ini merupakan pendorong utama dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal khususnya di Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Iimi, Atsushi, 2005. *Decentralization and economic growth revisited: an empirical note*, Journal of Urban economics 57.
- Malik, Shahnawaz, dkk, 2006. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth in Pakistan*, The Pakistan Development Review, 45: 4 part ii (Winter 2006).
- Oates, W. E, 1977. *An Economist's Perspective on Fiscal Federalism*, in: W. E. Oates (ed.), *The Political Economy of Fiscal Federalism*, Lexington, Toronto, 1977.
- Paddu, Abdul Hamid, 2010. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional di Indonesia*, Disertasi, Makassar.
- Woller, M Gary dan Phillips Kerk, 1998. *Fiscal Decentralization and LDC Economic Growth; An Empirical Investagion*, The Journal of Developmnet Studies; April 1998;34,4.
- Xie, D., Zou, H., dan Davoodi, H., 1998. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States*, Journal of Urban Economics XLV:228-39.
- Zhang Tao dan Zou Heng fu. 1998. *Fiscal Decentralization. Public Spending and Economic Growth in China*, Journal of Public Expenditure 67, 221 240.